

**PERAN PIMPINAN DALAM UPAYA PERCEPATAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM**
(Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana
S-1 Administrasi Publik**



Diajukan oleh:

**ANNISA SALSABILLA
NIM.07011182126019**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**“PERAN PIMPINAN DALAM UPAYA PERCEPATAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
(Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan)”**

SKRIPSI

Oleh :

ANNISA SALSABILLA

NIM. 07011182126019

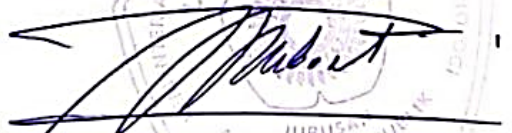
Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, 13 Maret 2025

Pembimbing



Aulia Utami Putri, S.IP., M.Si.
NIP.199508142019032020

**Mengetahui,
Ketua Jurusan,**



Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

“PERAN PIMPINAN DALAM UPAYA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)”

Skripsi

Oleh :

ANNISA SALSABILLA

07011182126019

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 7 Maret 2025

Pembimbing :

Aulia Utami Putri, S.I.P., M.Si.
NIP. 199508142019032020

Tanda Tangan



Penguji :

1. Dr. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001

2. Khairunnas, S.I.P., M.I.Pol.
NIP. 199405112023211012

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Salsabilla

Nim 07011182126019

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Peran Pimpinan Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Palembang, Februari 2025



Annisa Salsabilla
NIM. 07011182126019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang."

-Sri Mulyani
(Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2024-2029)

Atas Ridho Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa, motivasi, dan pengorbanan yang tiada hentinya;
2. Seluruh Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI;
3. Teman-teman seperjuangan dan Sahabat-sahabat terbaik;
4. Almamater tercinta, Universitas Sriwijaya.

ABSTRAK

Kemiskinan ekstrem di Provinsi Sumatera Selatan masih menjadi permasalahan serius meskipun tren menunjukkan penurunan. Beberapa daerah di Sumsel belum mencapai target nasional 0%, sehingga diperlukan strategi yang lebih efektif dalam percepatan penghapusannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran pimpinan BAPPEDA dalam koordinasi lintas sektor dan implementasi kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem. Penelitian ini dilakukan di BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Analisis penelitian didasarkan pada Teori Peran Pimpinan Kusnadi (2002), yang mencakup tiga dimensi utama berupa Peran Pribadi, Peran Informasi, dan Peran Pengambilan Keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan BAPPEDA telah memainkan perannya, namun masih terdapat kendala dalam konsistensi dan komitmen tindak lanjut koordinasi serta kurangnya arahan yang rinci. Pada dimensi Peran Pribadi, pimpinan mampu membangun komunikasi lintas sektor dan memotivasi tim, tetapi masih perlu penguatan dalam konsistensi pelaksanaan program. Pada dimensi Peran Informasi, pimpinan telah menyampaikan informasi dengan cepat dan strategis, meskipun penyebarannya belum merata. Pada dimensi Peran Pengambilan Keputusan, inovasi terbaru telah diterapkan dan negosiasi telah dilakukan dengan baik untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun peran pimpinan dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sudah cukup baik, masih diperlukan peningkatan komitmen, konsistensi dalam tindak lanjut kebijakan, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar program yang dijalankan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemiskinan Ekstrem, Peran Pimpinan, Percepatan, Penghapusan.

Pembimbing



Aulia Utami Putri, S.IP., M.Si
NIP. 19950814201903202

Indralaya, 13 Maret 2025
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 1969111019940110011

ABSTRACT

Extreme poverty in South Sumatra Province remains a serious issue despite a declining trend. Several regions in the province have yet to meet the national target of 0%, highlighting the need for more effective strategies to accelerate its eradication. This study aims to analyze the effectiveness of BAPPEDA leadership in cross-sectoral coordination and the implementation of extreme poverty eradication policies. The research was conducted at BAPPEDA of South Sumatra Province using a qualitative method with a descriptive approach. The analysis is based on Kusnadi's Leadership Role Theory (2002), which includes three main dimensions in the form of Interpersonal Role, Informational Role, and Decisional Role. The findings indicate that while BAPPEDA leadership has fulfilled its role, challenges remain in ensuring consistency, commitment to follow-up coordination, and the clarity of directives. In the Interpersonal Role dimension, the leadership has demonstrated the ability to establish cross-sectoral communication and motivate the team, yet improvements are needed in ensuring program implementation consistency. In the Informational Role dimension, information has been conveyed quickly and strategically, though its dissemination has not been fully optimized. In the Decisional Role dimension, recent innovations have been introduced, and negotiations have been conducted effectively to support the acceleration of extreme poverty eradication. The study concludes that although the leadership role in accelerating extreme poverty eradication has been fairly effective, further improvements in commitment, policy follow-up consistency, and cross-sectoral coordination are necessary to enhance the effectiveness and sustainability of the programs.


Keywords: *Acceleration, Eradication, Extreme Poverty, Leadership Role.*

Advisor



Aulia Utami Putri, S.IP., M.Si
NIP. 199508142019032020

Indralaya, 13 March 2025
Head of the Department of public Administration
Faculty of Social and Political Science


Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 1969111019940110011

KATA PENGANTAR

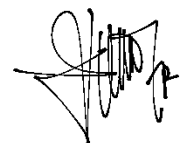
Puji syukur atas rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian berjudul "Peran Pimpinan dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)". Penelitian ini disusun sebagai syarat kelulusan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.

Penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Puryoto dan Ibunda Rusnani, terimakasih atas cinta tulus, doa dan segala pengorbanan nya selama ini
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis.
4. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., SH., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Aulia Utami Putri, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah banyak membantu dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
6. Ibu Dr. Martina, M.Si serta Bapak Khairunnas, S.IP., M.I.Pol selaku Dosen Penguji atas masukannya selama ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Anggota grup "*Pembasmi Granny*" Della Olivia Cintana, Intan Ayu Winira, Febria Argareta dan Daniel Setiawan yang sudah mendengar keluh kesah penulis dalam proses penyusunan skripsi.
9. Teman sekaligus sahabat penulis yaitu Nur Salsabilah, Mutiara Ayu dan Riza Putri yang telah menjadi tempat berbagi cerita.
10. Seluruh Pegawai BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan atas bantuan informasi dan data.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Februari 2024



Annisa Salsabilla
NIM. 07011182126019

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI..... | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| ABSTRACT..... | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| DAFTAR SINGKATAN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 15 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 16 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 16 |
| 1.4.1. Manfaat Teoritis..... | 16 |
| 1.4.2. Manfaat Praktis | 16 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 17 |
| 2.1. Landasan Teori | 17 |

| | |
|---|-----------|
| 2.1.1. Teori Manajemen Publik | 17 |
| 2.1.2. Teori Peran Pimpinan | 20 |
| 2.1.3. Kepemimpinan | 28 |
| 2.1.4. Kemiskinan Ekstrem..... | 30 |
| 2.2. Penelitian Terdahulu | 32 |
| 2.3. Kerangka Pemikiran..... | 40 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 44 |
| 3.1. Jenis Penelitian..... | 44 |
| 3.2. Definisi Konsep | 44 |
| 3.3. Fokus Penelitian..... | 46 |
| 3.4. Jenis dan Sumber Data..... | 48 |
| 3.5. Informan Penelitian..... | 49 |
| 3.6. Teknik Pengumpulan Data..... | 50 |
| 3.7. Teknik Analisis Data..... | 52 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN | 54 |
| 4.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian..... | 54 |
| 4.1.1. Deskripsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan..... | 54 |
| 4.1.2. Visi dan Misi Instansi | 55 |
| 4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat..... | 56 |
| 4.2. Pimpinan dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem . | 57 |

| | |
|--|------------|
| 4.3. Deskripsi Responden / Informan Penelitian..... | 61 |
| 4.4. Hasil dan Pembahasan | 62 |
| 4.4.1. Peran Pribadi (<i>Interpersonal Role</i>) | 63 |
| 4.4.2. Peran Informasi (<i>Informational Role</i>) | 76 |
| 4.4.3. Peran Pengambilan Keputusan (<i>Decisional Role</i>)..... | 95 |
| BAB V PENUTUP | 120 |
| 5.1. Kesimpulan | 120 |
| 5.2. Saran | 121 |
| DAFTAR PUSTAKA | 124 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 1. Keterlambatan Implementasi akibat kurangnya tindak lanjut rapat koordinasi | 11 |
| Tabel 2. Penelitian Terdahulu..... | 32 |
| Tabel 3. Fokus Penelitian | 47 |
| Tabel 4. Deskripsi Informan Penelitian..... | 62 |
| Tabel 5. Matriks Hasil dan Temuan Penelitian | 118 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----|
| Gambar 1. Tren Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024..... | 3 |
| Gambar 2. Perkembangan Persentase Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan 2024 | 4 |
| Gambar 3. Kerangka Pemikiran | 43 |
| Gambar 4. Peta Lokasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan | 54 |
| Gambar 5. Pertemuan Pimpinan BAPPEDA dengan instansi eksternal | 75 |
| Gambar 6. Tampilan Profil Grup Pimpinan BAPPEDA dengan Staf | 86 |
| Gambar 7. Data Rumah Tangga Miskin..... | 89 |
| Gambar 8. Rapat Koordinasi Langkah Konkrit Upaya Pengentasan Kemiskinan melalui CSR, BUMN, Swasta maupun Perbankan di Sumsel..... | 93 |
| Gambar 9. Tampilan Sigertak Plus..... | 99 |
| Gambar 10. Rencana Konsep Negosiasi Bantuan | 111 |
| Gambar 11. Wawancara dengan Sekretaris BAPPEDA Prov. Sumsel selaku Perwakilan Pimpinan BAPPEDA dan Sekretariat TKPK..... | 179 |
| Gambar 12. Wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Kesejahteraan Sosial..... | 179 |
| Gambar 13. Wawancara dengan Kepala Subbidang Kesejahteraan Sosial | 179 |
| Gambar 14 . Wawancara dengan Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat | 179 |
| Gambar 15. Wawancara dengan Fungsional Pertama Perencana..... | 180 |
| Gambar 16. Wawancara dengan Fungsional Perencana Ahli Muda | 180 |
| Gambar 17. Wawancara dengan Fungsional Perencana Muda | 180 |
| Gambar 18. Wawancara dengan Fungsional Arsiparis | 180 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1. Pedoman Wawancara..... | 129 |
| Lampiran 2. Matriks Wawancara | 134 |
| Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara | 179 |
| Lampiran 4. SK Pembimbing Skripsi..... | 181 |
| Lampiran 5. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi | 183 |
| Lampiran 6. Lembar Revisi Seminar Proposal..... | 184 |
| Lampiran 7. Kartu Bimbingan Skripsi | 185 |
| Lampiran 8. SK Ujian Skripsi | 186 |
| Lampiran 9. Lembar Revisi Ujian Skripsi..... | 187 |
| Lampiran 10. Surat Izin Penelitian Kesbangpol..... | 189 |
| Lampiran 11. Surat Rekomendasi Penelitian Kesbangpol | 190 |
| Lampiran 12. Surat Persetujuan Penelitian BAPPEDA Provinsi Sumsel | 191 |
| Lampiran 13. Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kabupaten/Kota | 192 |
| Lampiran 14. Hasil cek plagiarisme di Perpustakaan UNSRI | 194 |
| Lampiran 15. Struktur Organisasi BAPPEDA Sumsel | 195 |

DAFTAR SINGKATAN

1. BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. BAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. BLT : Bantuan Langsung Tunai
4. BPKAD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5. BPNT : Bantuan Pangan Non Tunai
6. BPS : Badan Pusat Statistik
7. BUMN : Badan Usaha Milik Negara
8. Bulog : Badan Urusan Logistik
9. CSR : *Corporate Social Responsibility*
10. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
11. Juknis : Petunjuk Teknis
12. Kaban : Kepala Badan
13. Kabid : Kepala Bidang
14. Kasubid : Kepala Subbidang
15. KUA : Kebijakan Umum Anggaran
16. LJK : Lembaga Jasa Keuangan
17. OPD : Organisasi Perangkat Daerah
18. P3KE : Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
19. PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
20. PKK : Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
21. PPAAS : Prioritas Plafon Anggaran Sementara
22. Regsosek : Registrasi Sosial Ekonomi
23. RKPD : Rancangan Kerja Pembangunan Daerah
24. RPKD : Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah

25. RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang
26. SDGs : *Sustainable Development Goals*
27. Sekda : Sekretaris Daerah
28. Sigertak : Sistem Informasi Gerakan Terpadu
29. Susenas : Survei Sosial Ekonomi Nasional
30. TKPK : Tim Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan
31. TNP2K : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
32. USD : *United States Dollar*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi salah satu persoalan krusial di berbagai negara di dunia. Di negara berkembang, utamanya di Indonesia isu ini menjadi sangat strategis dalam perencanaan pembangunan. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia menjadi tantangan dan *problems* yang terbilang kompleks serta *multidimensional* yang sudah lama juga menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan nasional. Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan ekonomi yang tidak mampu memenuhi standar hidup masyarakat di suatu daerah. Istilah kemiskinan ini dapat muncul ketika dalam pemenuhan kebutuhan minimum dari standar kehidupan yang ada itu tidak dapat terpenuhi. Dapat dikatakan kemiskinan apabila seseorang tidak mampu memenuhi keperluan hidupnya perihal makan, tempat tinggal, pendidikan, pakaian hingga tingkat kesehatannya (Musayyada & Husnurrosyidah, 2023).

Menurut *United Nations Development Program*, bahwa kemiskinan itu tidak hanya sebatas kekurangan pendapat dan akses sumber daya produksi saja, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kelangsungan hidup dapat terjamin. Kemiskinan dapat dikatakan terjadi apabila mencakup berbagai aspek seperti malnutrisi dan kelaparan, diskriminasi dan pengecualian sosial, rendahnya tingkat partisipasi pengambilan keputusan serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan dasar untuk memenuhi kehidupan layak (*United Nation*, 2022). Kemiskinan tidak hanya merupakan keadaan kurangnya suatu komoditas atau masalah kepuasan terhadap komoditas tersebut tetapi masyarakat kurang

memaksimalkan fungsi dari komoditas tersebut (Fatikhurriqzi & Kurniawan, 2022).

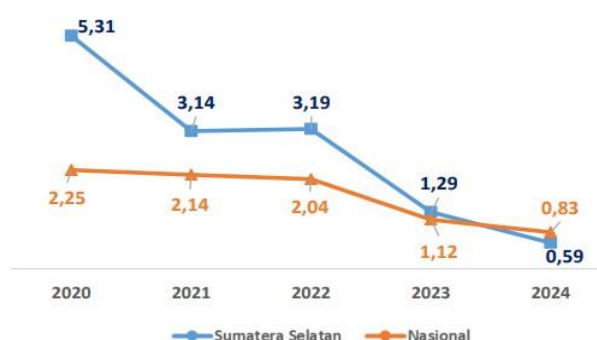
Kemiskinan yang sedang marak pada saat ini, yakni tentang kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem termasuk ke dalam kategori yang bisa dikatakan kemiskinan terparah dalam hal kecukupan minimum (Setianingdiah & Prasodjo, 2024). Pada arti kata lain, kemiskinan ekstrem ini tidak hanya dilihat dari pendapatan di suatu daerah saja melainkan juga dilihat dari tingkat kesehatan, sanitasi layak serta tingkat pendidikan di daerah tersebut (Musayyada & Husnurrosyidah, 2023). Berdasarkan Bank Dunia, yang dikatakan miskin ekstrem ialah penduduk yang dalam kebutuhan hariannya hanya mampu senilai tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*) atau sebanding dengan Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan. Secara ringkas, dalam sebuah keluarga terdiri dari empat anggota yaitu ayah, ibu dan dua anak, apabila kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran bulanan berada di bawah Rp. 1.288.680/keluarga maka keluarga tersebut dikategorikan sebagai miskin ekstrem (BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, 2024).

Perbedaan antara miskin biasa dan miskin ekstrem dapat dilihat dari dua aspek utama yang dimana pada kemiskinan biasa menggambarkan individu atau keluarga yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan, tetapi masih mampu memenuhi sebagian kebutuhan dasar meskipun terbatas. Kelompok ini juga rentan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem jika menghadapi guncangan ekonomi. Sementara itu, kemiskinan ekstrem adalah kondisi yang lebih parah, di mana pendapatan jauh di bawah standar, sehingga kebutuhan pokok seperti makanan, air bersih, dan tempat tinggal layak sulit terpenuhi. Mereka yang berada dalam

kondisi ini sangat rentan dan membutuhkan bantuan signifikan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. (BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, 2024).

Sebagai anggota dan bagian dari PBB, Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan target *Sustainable Development Goals* termasuk pengentasan kemiskinan. Untuk mendukung upaya ini, pemerintah Indonesia telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan menyalurkan dana desa. Dengan demikian, *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi kerangka internasional yang juga diadopsi secara nasional oleh Indonesia dalam mengarahkan upaya pengentasan kemiskinan (Ishartono & Raharjo, 2016).

Gambar 1. Tren Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

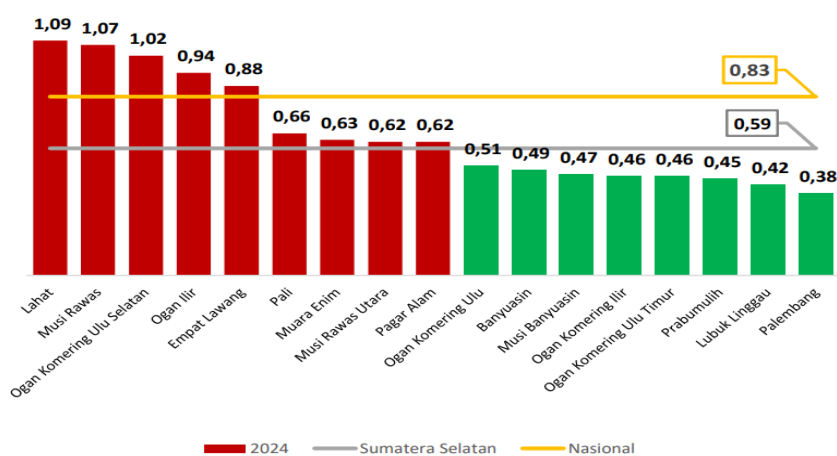


Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2023

Gambar 1 menunjukkan bahwa untuk mengetahui data mengenai jumlah dan angka kemiskinan ekstrem setiap tahunnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Tingkat kemiskinan ekstrem nasional menunjukkan tren penurunan yang signifikan, berkurang dari 2,25 persen di tahun 2020 menjadi 0,83 persen di tahun 2024. Demikian pula tingkat kemiskinan ekstrem di level provinsi yang juga mengalami pengurangan selama periode yang sama. Di provinsi Sumatera Selatan, terjadi penurunan yang

cukup substansial sebesar 4,72 poin persentase dari 5,31 persen di tahun 2020 lalu menjadi hanya 0,59 persen pada tahun 2024. Dengan tingkat kemiskinan ekstrem saat ini yang mencapai angka 0,59 persen tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tetap optimis bahwa target pemerintah pusat untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0% di Indonesia dapat direalisasikan pada tahun 2024.

Gambar 2. Perkembangan Persentase Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2023

Gambar 2 menunjukkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 terdapat 14 Kabupaten/Kota yang tingkat kemiskinan ekstremnya telah mencapai sekitar 0 persen. Sementara itu, tiga Kabupaten/Kota lainnya, yaitu Kabupaten Lahat sebesar 1,09 persen, Kabupaten Musi Rawas sebesar 1,07 persen, dan Kabupaten OKU Selatan sebesar 1,02 persen, masih memiliki tingkat kemiskinan ekstrem.

Dalam penanggulangan kemiskinan ini harus dilakukan upaya secara menyeluruh yang mencakup aspek kehidupan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga pelaksana di

lingkungan pemerintah provinsi yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, bertugas memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan terlaksana secara efektif dengan menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplikasi sehingga kontribusi terhadap pencapaian visi misi pembangunan daerah dapat terlaksana.

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, pengertian fungsi dan kesepakatan BAPPEDA di Provinsi Sumatera Selatan, BAPPEDA bertugas membantu gubernur dalam mengurus pemerintahan provinsi di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan (BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, 2024).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ikut serta dalam penanggulangan kemiskinan yakni selaku lembaga perwakilan di daerah. Kebijakan penanggulangan kemiskinan harus searah antara pemerintah pusat dan daerah sehingga untuk itu diperlukan adanya koordinasi. Koordinasi tersebut dapat menimbulkan dampak yang signifikan, dalam hal ini diperlukan strategi percepatan penghapusan kemiskinan. Upaya percepatan penghapusan kemiskinan ini diperlukan langkah-langkah koordinasi yang terarah antar lintas sektor dalam persiapan perumusan serta penyelenggaraan kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan (Attaullah, 2023). Dalam hal ini, BAPPEDA berperan penting selaku koordinator dalam pembangunan mengatasi pengangguran dan kemiskinan masyarakat (*Stakeholder*).

Pada upaya pengentasan kemiskinan ini, BAPPEDA tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK). Sebuah tim lintas sektoral yang dibentuk untuk memperkuat sinergi dan keselarasan program di

tingkat daerah. TKPK berfungsi sebagai wadah koordinasi yang mengintegrasikan berbagai peran dan tugas dari instansi terkait, termasuk BAPPEDA, guna menyusun kebijakan dan strategi yang terarah untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem. Melalui keterlibatannya dalam TKPK, BAPPEDA berperan dalam proses penyalarsan program, pengalokasian sumber daya, dan pemantauan pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, BAPPEDA tidak hanya bertugas dalam perencanaan tetapi juga memastikan agar kegiatan-kegiatan yang diusulkan dapat berjalan sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Permendagri No 53 Tahun 2020, BAPPEDA Provinsi Sumsel berkedudukan sebagai sekretariat TKPK Provinsi yang di mana hal ini tercantum pada pasal 9 bahwa “Sekretariat TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan”. Pada pasal ini juga dijelaskan bahwa Sekretariat TKPK Provinsi memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan administratif dan teknis.
2. Menyediakan data dan informasi terkait Penanggulangan Kemiskinan.
3. Menyiapkan bahan untuk RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan.
4. Memberikan dukungan berupa bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Provinsi.

Keberhasilan penghapusan kemiskinan ekstrem tidak hanya bergantung pada perencanaan kebijakan yang matang, tetapi juga sangat ditentukan oleh efektivitas kepemimpinan dalam mengarahkan, mengoordinasikan, dan memastikan kebijakan dapat dijalankan secara optimal. Kepemimpinan berperan

krusial dalam mengarahkan organisasi melalui perubahan tersebut. Pemimpin yang efektif mampu menginspirasi, memotivasi, dan membimbing timnya agar berperan aktif dalam setiap tahap perubahan yang diperlukan (Khairunnisa & Khodijah, 2024).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumsel memegang peranan kunci dalam memastikan seluruh rangkaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan terkoordinasi secara efektif. Peran strategis ini tercermin dalam tugas dan fungsi yang diembannya, yang mencakup berbagai aspek dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam mendalami dan memahami pentingnya peran Pimpinan BAPPEDA Sumsel ini, perlu dilihat lebih dalam mengenai tugas pokok dan fungsinya secara umum. Kepala Badan memiliki tugas untuk membantu Gubernur dalam menjalankan pemerintahan provinsi, khususnya di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Tugas dan fungsi pimpinan (Kepala Badan) apabila dikhususkan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini akan menyesuaikan dengan tugas dari Sekretariat TKPK itu sendiri yakni yang sudah tertera pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 pasal 9 berupa memastikan dukungan program dan kegiatan lintas sektor pada perangkat daerahnya masing-masing. Proses ini melibatkan pengambilan keputusan mengenai program-program yang akan diusulkan, yang selanjutnya akan dibahas secara simultan dengan DPRD dalam tahapan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) di BPKAD. Setelah kesepakatan anggaran dicapai bersama DPRD dan dialokasikan dalam APBD, tugas dan fungsi pimpinan tidak berhenti pada perencanaan semata. Pimpinan BAPPEDA memiliki tanggung jawab untuk

memastikan bahwa kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan efektif, serta dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala. Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam merancang rencana kegiatan tahun berikutnya, memastikan bahwa program penanggulangan kemiskinan ekstrem berjalan secara berkesinambungan dan tepat sasaran.

Sesuai dengan pasal 17 pada Permendagri 53 Tahun 2020 dalam hal penanggulangan kemiskinan terdapat strategi penanggulan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan cara mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil, sinergi kebijakan dan program pengentasan kemiskinan (BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, 2024).

Pemerintah memprioritaskan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang di mana upaya tersebut diharapkan dapat mencapai target 0% pada tahun 2024 di provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan di beberapa daerah yang angka kemiskinannya mencapai 1% yakni pada Kabupaten Lahat, Musi Rawas dan Oku Selatan. Hal tersebut tercantum pada Gambar 2 (BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, 2024). Dalam hal ini, penulis perlu melihat bagaimana pimpinan BAPPEDA menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengoordinasikan berbagai strategi yang bertujuan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, beberapa faktor internal dan

eksternal dalam pelaksanaan tugas oleh Pimpinan BAPPEDA Sumatera Selatan selaku sekretariat TKPK masih menghadapi beberapa kendala yaitu:

1. Kurangnya komitmen pimpinan terhadap tindak lanjut rapat koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

Rapat koordinasi merupakan salah satu instrumen utama dalam perumusan dan implementasi kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Melalui rapat ini, pimpinan BAPPEDA memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan kebijakan, memastikan koordinasi lintas sektor, serta menindaklanjuti hasil keputusan agar dapat diterapkan secara efektif oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kenyataan dalam praktiknya, masih ditemukan kendala dalam komitmen pimpinan terhadap tindak lanjut hasil rapat koordinasi, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Salah satu faktor yang memengaruhi kurangnya tindak lanjut adalah banyaknya agenda tematik pembangunan lainnya yang juga menjadi prioritas pemerintah daerah. Isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi sering kali menguras konsentrasi aparatur perencana, sehingga perhatian terhadap kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi kurang optimal. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat BAPPEDA Sumsel, yang menyebutkan bahwa:

“Salah satu kendala utama adalah banyaknya agenda tematik pembangunan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi, yang membutuhkan perhatian besar dari aparatur perencana. Hal ini menguras konsentrasi mereka, sehingga fokus untuk menelaah kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi kurang optimal.” (Wawancara, RR, 12/11/2024).

Dalam beberapa kasus, hasil rapat koordinasi yang telah menghasilkan kebijakan strategis tidak selalu ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Kurangnya komitmen pimpinan dalam mengawal implementasi kebijakan menyebabkan rekomendasi atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat seringkali hanya menjadi dokumen formal tanpa realisasi yang jelas di lapangan. Dalam hal ini, peran pimpinan sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang telah disepakati dalam rapat tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi juga ditindaklanjuti hingga tahap implementasi dan evaluasi. Fungsional Perencana Muda di BAPPEDA Sumsel, juga menyoroti pentingnya komitmen pimpinan dalam memastikan strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem berjalan dengan baik.

“Paling balik ke komitmen pimpinan, komitmen mereka harus kuat dan fokus terhadap strategi dan implementasi penurunan kemiskinan ekstrem, akan tetapi pimpinan tentunya memiliki prioritas lain dan khawatirnya fokus pimpinan tidak bisa hanya terfokus pada kemiskinan saja”. (Wawancara, IJ, 12/11/2024).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tanpa komitmen kepemimpinan yang kuat, rapat koordinasi berisiko hanya menjadi agenda rutin tanpa dampak yang signifikan terhadap percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Bukti yang memperkuat analisis ini, terdapat ketimpangan antara keputusan rapat koordinasi dan realisasi program di lapangan. Berdasarkan Laporan Evaluasi Program PPKE Triwulan II Tahun 2024, ditemukan bahwa dari 10 kebijakan strategis yang telah dirancang dalam rapat koordinasi, hanya 4 kebijakan yang terealisasi sesuai rencana, sementara 6 lainnya mengalami keterlambatan atau tidak dijalankan sama sekali karena kurangnya tindak lanjut. Tabel berikut menggambarkan ketidaksesuaian antara keputusan rapat dan realisasi di lapangan:

Tabel 1. Keterlambatan Implementasi akibat kurangnya tindak lanjut rapat koordinasi

| No | Kebijakan Strategis yang Dirumuskan | Status Implementasi | Keterangan |
|----|---|---------------------|--|
| 1 | Integrasi Data Kemiskinan Ekstrem dengan DTKS dan P3KE | Tidak Terlaksana | Tidak ada mekanisme pengawalan dari pimpinan |
| 2 | Optimalisasi Program Pemberdayaan Masyarakat di 5 Kabupaten Prioritas | Terlambat | Implementasi baru mencapai 30% karena minim koordinasi lintas sektor |
| 3 | Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Langsung Tunai (BLT) | Terlaksana | Dokumen telah disusun, tetapi belum diterapkan di semua daerah |
| 4 | Pendampingan Program Kemandirian Ekonomi bagi Keluarga Miskin | Tidak Terlaksana | Tidak ada evaluasi lanjutan dari pimpinan |
| 5 | <i>Monitoring</i> dan Evaluasi PPKE Triwulan II | Terlambat | Tidak ada pelaporan berkala dari OPD ke pimpinan |

Sumber: Laporan Evaluasi Program PPKE Triwulan II Tahun, 2024

Tabel 1 menunjukkan bahwa banyak kebijakan strategis yang telah disepakati dalam rapat koordinasi tetapi gagal diimplementasikan dengan baik karena kurangnya mekanisme pengawalan yang ketat dari pimpinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa komitmen kepemimpinan yang kuat, hasil rapat koordinasi berisiko hanya menjadi agenda rutin tanpa dampak yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem sehingga diperlukan mekanisme yang lebih efektif dalam menindaklanjuti hasil rapat, seperti penetapan target capaian yang lebih spesifik, sistem *monitoring* yang ketat, serta keterlibatan langsung pimpinan dalam mengawal implementasi kebijakan. Dengan adanya komitmen yang lebih kuat dari pimpinan, koordinasi lintas sektor dapat berjalan lebih optimal, sehingga program penghapusan kemiskinan ekstrem di Sumatera Selatan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

2. Arahan yang diberikan masih bersifat umum dan kurang rinci sebagai pedoman pelaksanaan.

Dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kepemimpinan memegang peranan sentral dalam memastikan bahwa kebijakan dan program yang telah dirancang dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Sebagai pengarah utama dalam perencanaan pembangunan daerah, pimpinan memiliki kewajiban untuk memberikan arahan yang jelas dan terukur kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pihak-pihak yang terlibat dalam program pengentasan kemiskinan. Pada praktiknya, salah satu permasalahan yang muncul dalam kepemimpinan di tingkat daerah adalah penyampaian arahan yang masih bersifat umum dan tidak cukup rinci untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan di lapangan. Seperti yang disampaikan oleh Fungsional Pertama asriparis BAPPEDA Provinsi Sumsel.

“Pimpinan selalu memberikan arahan yang bersifat strategis pada rapat-rapat penting, terutama terkait perencanaan dan evaluasi. Meski begitu, kadang-kadang ada beberapa arahan yang sifatnya umum dan tidak cukup rinci untuk dijadikan pedoman pelaksanaan. Saya rasa, pengoptimalan detail dari arahan pimpinan ini akan membantu mempercepat eksekusi program yang telah direncanakan.” (Wawancara, AN, 08/08/2024).

Arahan yang diberikan oleh pimpinan seharusnya mampu menjadi landasan yang jelas bagi OPD dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang serta menjalankan program secara sistematis. Pada kenyataannya sering kali ditemukan bahwa arahan yang disampaikan hanya bersifat normatif dan kurang memberikan detail teknis mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh pelaksana di tingkat operasional. Ketidakjelasan dalam penyampaian instruksi ini

menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda di antara OPD, yang pada akhirnya berdampak pada pelaksanaan program yang tidak selaras dan kurang efektif.

Ketiadaan arahan yang rinci juga berdampak pada efektivitas *monitoring* dan evaluasi program. Tanpa adanya pedoman yang spesifik, sulit bagi tim pelaksana untuk mengukur apakah program telah berjalan sesuai dengan ekspektasi pimpinan atau tidak. Hal ini juga menyulitkan dalam proses akuntabilitas, karena tanpa indikator yang jelas, keberhasilan atau kegagalan suatu program menjadi sulit untuk dievaluasi secara objektif yang mengakibatkan banyak kebijakan yang bersifat reaktif, hanya menyesuaikan dengan kondisi lapangan tanpa memiliki tolok ukur yang sistematis dalam pelaksanaannya.

Arahan yang terlalu umum berisiko menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pengambilan keputusan di tingkat teknis. Tanpa petunjuk yang jelas, setiap instansi atau OPD cenderung membuat kebijakan sendiri-sendiri yang belum tentu selaras dengan kebijakan utama yang telah ditetapkan. Hal ini semakin diperparah dengan minimnya mekanisme koordinasi yang efektif untuk memastikan bahwa seluruh pihak bergerak dalam satu arah yang sama, sehingga program yang seharusnya berjalan terpadu dan saling mendukung justru menjadi tumpang tindih atau bahkan tidak berjalan sama sekali karena kurangnya kejelasan dalam implementasinya. Permasalahan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem tidak hanya membutuhkan visi yang kuat, tetapi juga keterampilan dalam menyampaikan arahan yang jelas dan terukur. Tanpa hal tersebut, kebijakan yang telah dirancang berisiko menjadi tidak efektif, karena para pelaksana di lapangan tidak memiliki panduan yang cukup untuk menjalankannya dengan optimal.

3. Minimnya diskusi terbuka

Minimnya diskusi terbuka dalam pengambilan keputusan mengakibatkan terbatasnya ruang partisipasi bagi seluruh elemen dalam organisasi. Penyampaian informasi yang hanya terfokus pada level Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala Subbidang (Kasubid) menyebabkan staf di tingkat pelaksana sering kali tidak mendapatkan informasi yang utuh dan komprehensif. Akibatnya, pemahaman mereka terhadap kebijakan yang sedang dijalankan menjadi terbatas, sehingga inisiatif dan kontribusi mereka dalam memberikan masukan atau inovasi menjadi kurang optimal. Seperti pada kutipan wawancara berikut:

"Saya rasa perlu ada mekanisme komunikasi yang lebih terbuka, misalnya melalui pertemuan rutin yang tidak hanya melibatkan Kabid dan Kasubid, tetapi juga staf pelaksana. Selain itu, bisa dibuat sistem penyebaran informasi seperti grup internal atau laporan berkala yang bisa diakses oleh semua tim. Dengan begitu, setiap orang dalam organisasi bisa lebih memahami kebijakan yang sedang dijalankan dan bisa berkontribusi secara lebih maksimal." (Wawancara, WS, 12/11/2024).

Pola komunikasi yang hierarkis ini berpotensi menimbulkan bias dalam penyampaian kebijakan, di mana hanya perspektif tertentu yang lebih dominan dalam perumusan keputusan padahal keterlibatan staf di berbagai tingkatan sangat diperlukan untuk menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Kurangnya akses informasi bagi staf juga dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam implementasi kebijakan, karena mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai arah strategis yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Mekanisme komunikasi diperlukan yang lebih inklusif dan partisipatif seperti pertemuan berkala yang melibatkan seluruh tim atau sistem penyebaran informasi yang lebih terbuka agar setiap anggota itu memiliki akses yang setara dalam organisasi, dapat lebih memahami kebijakan yang sedang dijalankan dan

turut serta dalam memberikan kontribusi yang lebih maksimal dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dari permasalahan di atas, terlihat bahwa hambatan utama dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bukan hanya terletak pada kebijakan yang dirancang, tetapi lebih pada bagaimana kepemimpinan BAPPEDA dalam mengoordinasikan, mengarahkan, dan memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif. Kendala dalam aspek kepemimpinan inilah yang menjadi alasan utama penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana peran pimpinan BAPPEDA dalam mengawal percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pimpinan BAPPEDA menjalankan perannya dalam memberikan arahan strategis, mengawasi implementasi kebijakan, serta memastikan validitas data. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam memahami peran kepemimpinan dalam sektor publik, tetapi juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai gejala yang terdapat di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu: Bagaimana Peran Pimpinan Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)?

1.3. Tujuan Penelitian

Bedasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Pimpinan Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan).

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat ikut serta dalam memberi kontribusi secara positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik serta memperkaya kepustakaan dan pemahaman tentang peran pemimpin sebagai upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi BAPPEDA dalam mengoptimalkan peran pemimpin untuk meningkatkan efektivitas organisasi serta mempertahankan dan mengelola sumber daya manusia guna mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi dalam mengkaji peran kepemimpinan dalam percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem serta memperluas wawasan dalam studi kepemimpinan dan manajemen pemerintahan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi indikator peningkatan kualitas penelitian di Universitas Sriwijaya, khususnya dalam bidang kepemimpinan publik dan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, E. (2020). Kemiskinan Dan Fakor-Faktor Penyebabnya. *Journal of Social Work and Social Service*. 1(1), 43–50. Diakses dari <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/6336> Pada 9 Maret 2025, 15.12 pm.
- Annisa, N., Bakhri, H. S., & Asri, M. (2023). Peran Pemimpin Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Yasmib Sulawesi (Swadaya Mitra Bangsa) Kota Makassar. 15(1), 72–86. <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6>. Diakses pada 14 Januari 2025, 23.58 pm.
- Anto, R. P., Nur, N., Yusriani, Ardah, F. K., Ayu, J. D., Nurmahdi, A., Apriyeni, B. A. R., Purwanti, Adrianingsih, arita Y., & Putra, M. F. P. (2024). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Penerapannya. *In Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 2). Diakses dari <https://www.tahtamedia.com/pendidikan/metode-penelitian-kualitatif-teori-dan-penerapannya/>. Pada 10 September 2024, 13.00 pm.
- Anugrah R, F. (2020). Pengaruh Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup terhadap Kemiskinan Masyarakat Perkotaan (Survey pada Masyarakat Miskin Kecamatan Bojongloakaler Kota Bandung). *Journal of Business and Political Economy : Biannual Review of The Indonesian Economy*, 2(1), 57–73. <https://doi.org/10.46851/28>. Diakses pada 12 Maret 2025, 20.00 pm.
- Arina, Y., Febrianti, H., Sabandi, A., & Alkadri, H. (2023). Peran Pemimpin dalam Pengambilan Keputusan. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 747–753. <http://103.20.188.221/index.php/annidhom/article/view/4460>. Diakses pada 11 Maret 2025, 23.30 pm.
- Arnas. (2022). Peran Kepemimpinan dalam Birokrasi Pemerintahan Kampus Sulawesi Selatan (*The Role of Leadership in Government Bureaucracy At The Institute of Domestic Government Campus*). 4(1), 79–88. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jpp/article/view/2642>, Diakses pada 22 Oktober 2024, 01.00 am.
- Attaullah, M. I. (2023). Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (Issue 112). Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <https://www.researchgate.net/publication/372224673>. Diakses pada 19 Agustus 2024, 15.30 pm.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Penduduk Miskin. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>. Diakses pada 2 Agustus 2024, 14.22 pm.
- BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan. (2024). Laporan Pelaksanaan Percepatan

Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2024.

- Desi Fitriyana, Assayuti, M. J., Suryaningsih, Laia, H. W., Wahyudin, C., & Salbiah, E. (2024). Peran Kepemimpinan Dalam Organisasi. *Jurnal Karimah Tauhid*, 3(2), 1747–1763. <https://doi.org/10.30997>. Diakses pada 25 September 2024, 13.00 pm.
- Dienovyna, E., Prasetyo, B. D., & Wisadirana, D. (2019). Peran Komunikasi Pimpinan Terhadap Bawahan Dalam Meningkatkan Pelayanan Prima (Studi Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan). Wacana, *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 18(01), 31–40. <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2015.018.01.4>. Diakses pada 10 Januari 2025, 16.32 pm.
- Enceng, & Aslichati, L. (2019). Konsep Dasar Kepemimpinan (pp. 1–62). Universitas Terbuka. <http://repository.ut.ac.id/id/eprint/4739>. Diakses pada 7 Januari 2025, 22.52 pm.
- Fatikhurizqi, A., & Kurniawan, B. D. (2022). Peran Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur Tahun 2020. Seminar Nasional *Official Statistics*, 2022(1), 1027–1036. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1322>. Diakses pada 12 Agustus 2024, 17.20 pm.
- Faujan, L. O., & Agustina, N. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Status Kemiskinan Ekstrem Rumah Tangga di Provinsi Maluku Tahun 2021. Seminar Nasional *Official Statistics*, 2023(1), 343–352. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2023i1.1639>. Diakses pada 3 September 2024, 14.12 pm.
- Fazrien, A., & Domai, T. (2021). Peran Pemimpin dalam Pencapaian Kinerja Pegawai (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 603–607. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/116412/>. Diakses pada 8 Januari 2024, 16.24 pm.
- Google Inc. (2024). *Google Maps*: Peta Lokasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam <http://maps.google.com/>. Diakses pada 22 Agustus 2024, 19.22 pm.
- Hardiyanto. (2020). Manfaat *Monitoring* Dan Evaluasi (Monev) Terhadap Peningkatan Kinerja Penganggaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. <https://id.scribd.com/document/728199438/0318038704-32336-231128110901>. Diakses pada 8 Januari 2025, 21.56 pm.
- Hariyanti, S. A., Manafe, L. A., & Wulansari, D. (2023). Peran Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada PT. Permata Anugerah Yalapersada. *Edunomika*, 7(2), 1–15. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3573/1/SKRIPSI%20BAHRUMI%20SUGANDA.pdf>. Diakses pada 10 Maret 2025, 14.23 pm.
- Haruna, P. S. S., Mappamiring, M., & Yusuf, M. (2024). Peran Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja. *Kajian Ilmiah Mahasiswa*

- Administrasi Publik (KIMAP)*, 5(3), 518–528. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/14128>. Diakses pada 29 Agustus 2024, 18.45 pm.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis). <https://id.z-lib.gs/book/26733869/de3f5a/analisis-data-penelitian-kualitatif-konsep-teknik-prosedur-analisis.html>. Diakses pada 11 September 2024, 19.00 pm.
- Heryana, A. (2020). Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. <https://eprints.polsri.ac.id>. Diakses pada 12 Maret 2025, 12.10 pm.
- Hisyam, M. A. N., Ramadhani, N. P., Amanda, O., Fakhrana, T. N., Sukmawati, E., & Nisa, P. K. (2022). Peran Kepemimpinan Pada Program Keluarga Harapan (Pkh) Desa Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. *Jurnal Penulisan Pendidikan Sosial*, 7(2). <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/download/1514/1034>. Diakses pada 16 Agustus 2024, 16.21 pm.
- Ishartono, & Raharjo, S. T. (2016). *Sustainable Development Goals (SDGS) dan Pengentasan Kemiskinan. SHARE Social Work Journal* *Social Work Journal*, 06(02), 154–272. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13198>. Diakses pada 22 Agustus 2024, 10.53 am.
- Khairunnisa, A., & Khodijah, N. (2024). Kepemimpinan sebagai Pendorong Utama Transformasi Organisasi. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(1). <https://journal.rumahindonesia.org/index.php/njpi/index>. Diakses pada 11 Maret 2025, 15.40 pm.
- Mahirun, M., Suryani, S., & Nasution, N. B. (2021). Kepemimpinan Transformatif Sebagai Model Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Kreatif. *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 35(2), 64. <https://doi.org/10.31941/jurnalpena.v35i2.1583>. Diakses pada 25 September 2024, 14.38 pm.
- Mardani. (2024). Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer. Kencana. https://books.google.co.id/books/about/Teori_Hukum.html?id=o6_8EAAAQBAJ&redir_esc=y. Diakses pada 21 September 2024, 17.10 pm.
- Muhammad Ridhani Maulana. (2020). Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin. Universitas Islam Kalimantan. <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/33897>, Diakses pada 14 Januari 2024, 18.42 pm.
- Musayyada, Y., & Husnurrosyidah. (2023). Peran BAPPEDA Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Pati. *Majalah Ekonomi*, 28(02), 63–77. <https://doi.org/10.36456/majeko.vol28.no02.a8040>. Diakses pada 10 Agustus

2024, 13.02 pm.

- Mutiara, I., Lathifah, Z. K., Haris, R., & Kurniawan, I. (2024). Analisis Peran Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Madrasah *Analysis of the Leadership Role of Madrasah Heads in Efforts To Improve Madrasah Quality. Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), 30–40. <https://ojs.unida.ac.id/al-kaff/article/view/11879>. Diakses pada 12 Maret 2025, 21.05 pm.
- Najwa, L., Iqbal, M., & Muslim, A. (2021). Metode Penelitian Kebijakan Pendidikan Alternatif metodologi dalam Penyusunan Skripsi (Bagian 2). *Jurnal Visionary : Penulisan Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, 9(2), 34–43. <https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/visionary>. Diakses pada 1 September 2024, 19.22 pm.
- Nashrullah, M., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, N., & Untari, R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7>. Diakses pada 12 Maret 2025, 18.50 pm.
- Putra, F. A. (2022). Peran Manajer Dalam Pengembangan Wisata Kulier Halal Di Rumah Makan Bebek Rizky Bangkalan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3), 403–413. <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/1047/768>. Diakses pada 13 Agustus 2024, 00.50 pm.
- Rany Novita dan Yunita Jasrida. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Kesehatan. *Global Aksara Pers.* https://www.researchgate.net/publication/359652702_Metodologi_Penelitian_Kualitatif. Diakses pada 12 Maret 2025, 15.45 pm.
- Romlah, L. S., Patimah, S., Subandi, & Makbulloh, D. (2023). Peran Pemimpin Dalam Menyelesaikan Permasalahan Internal (Studi Di Uin Raden Intan Lampung). *At-Tajdid Jurnal*, 07, 363–371. <http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/attajdid/article/download/2984/1648>. Diakses pada 1 September 2024, 19.30 pm.
- Setianingdiah, S. N., & Prasodjo, N. W. (2024). Profil Rumah Tangga Miskin Ekstrem di Perkotaan (Kasus pada Komunitas Taru , Kecamatan Bogor Utara , Kota Bogor , Jawa Barat) *Profile of Extremely Poor Households in Urban Area (Case in the Taru Community , North Bogor Subdistrict , Bogor City , West J.* 08(01), 127–137. <https://ejournal-skpm.ipb.ac.id/index.php/jskpm/article/view/1158>. Diakses pada 19 Agustus 2024, 01.52 am.
- Siregar, E. (2021). Pengantar Manajemen dan Bisnis (N. Risnawati (ed.); Cetakan Pe). Widina Bhakti Perkasa Bandung. <http://repository.uki.ac.id/id/eprint/7771>. Diakses pada 24 September 2024, 15.11 pm.
- Solahudin, D. S., Sagita, N. I., & Sutisna, J. (2022). Optimalisasi Peran Litbang Dalam Mewujudkan Kegiatan Litbang Satu Pintu Di Kota Bandung. *JANITRA : Jurnal*

- Administrasi Pemerintahan*, 2(2), 302–308.
<https://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article/viewFile/45167/19297>. Diakses pada 3 September 2024, 22.56 pm.
- Solihat, M. (2021). Kepemimpinan dan Gaya Komunikasi: Sebuah Telaah Pustaka Pada Teori Kepemimpinan dan Gaya Komunikasi Seseorang dalam Suatu Organisasi. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 1, 87–98. <https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/30685>. Diakses pada 12 Maret 2025, 02.43 am.
- Suhartono, S., Arsyad, N., & Amelia, F. (2020). Peran kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Studi pada pemerintah desa tonasa dan desa mamampang, tombolo pao). *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 3(3), 336–353. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v3i3.142>. Diakses pada 14 Januari 2025, 23.02 pm.
- Suherman, U. D. (2019). Pentingnya Kepimpinan dalam Organisasi. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(2), 260–274. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/5561>. Diakses pada 25 September 2024, 12.22 pm.
- Suwatno. (2019). Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi Publik dan Bisnis (H. Eryanto (ed.); Pertama). Bumi Aksara. https://books.google.co.id/books/about/Pemimpin_dan_Kepemimpinan.html?id=Sq_xDwAAQBAJ&redir_esc=y. Diakses pada 23 September 2024, 15.22 pm.
- Syahputra, D. R., & Aslami, N. (2023). Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 1(3), 51–56. <https://www.semanticscholar.org/paper/Prinsip-Prinsip-Utama-Manajemen-George-R.-Terry>. Diakses pada 28 September 2024, 20.20 pm.
- United Nation*. (2022). *Ending Poverty*. United Nation. <https://www.un.org/en/global-issues/ending-poverty> Diakses Pada 25 Juli 2024, 20.45 pm.
- Wanhuri Meiko, Jatmiko Yogopriyatno, Y. H. (2024). Peran Manajerial Kepala Bidang di Lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Penembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Bengkulu. *Mimbar : Jurnal Penulisan Sosial Dan Politik*, 13(1), 167–179. <https://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/19881> Diakses pada 11 Maret 2025, 01.22 am.
- Widiana, M. E. (2020). Buku Ajar Pengantar Manajemen. CV. Pena Persada. <http://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/1291>. Diakses pada 10 Januari 2025, 16.04 pm.
- Zulkifli, & Putri, C. M. (2023). Peranan BAPPEDA Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (EMBISS)*, 3(3), 287–291. <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/228>. Diakses pada 23 Agustus 2024, 20.12 pm.